

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu usaha untuk melakukan perubahan terhadap keadaan yang lebih baik. Usaha pembangunan didasarkan pada proses pelaksanaan pembangunan, dimana pelaksanaan pembangunan itu terjadi pembaharuan segala bidang kehidupan, baik perubahan yang bersumber dari pergeseran nilai, gagasan, keyakinan dan sebagainya. Proses pelaksanaan pembangunan harus berpatokan pada pembangunan nasional.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan itu bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ini merupakan rangkaian upaya perbaikan dan peningkatan taraf kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Dari pembangunan itu, telah banyak membuahkan hasil bagi kehidupan penduduk, namun masih belum merata diberbagai bidang termasuk dalam sektor fasilitas sosial ekonomi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya masalah tersebut ialah : (1) kurangnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya kerjasama, (2) selama ini pola perencanaan pembangunan mengartikan makna partisipasi sebagai dukungan rakyat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya, dan (3) kurangnya kesiapan masyarakat atau sumberdaya manusia padahal sumberdaya alam jumlahnya relatif besar, ini memerlukan pengelolaan

yang lebih intensif agar mampu memiliki produktifitas yang tinggi (Junaedi, 1999).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi adalah melaksanakan pembangunan secara desentralisasi artinya bahwa setiap daerah diberi wewenang untuk mematuhi dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kepentingan daerahnya. Oleh sebab itu pemerintah daerah lebih kreatif dan produktif sehingga mendorong terwujudnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Disamping itu, sistem desentralisasi akan mengurangi masalah-masalah demokratis seperti lebih meratanya kepadatan penduduk, berkurangnya arus migrasi dan sebagainya (Wijaya, 1998). Selain itu, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama menikmati hasil pembangunan sesuai dengan kemampuannya. Syarat dari keikutsertaan yaitu seluruh anggota masyarakat selain peluang dan akses yang sama juga meliputi kemampuan kerjasama antara rakyat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, menjaga, melestarikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai namun hasilnya belum sesuai dengan harapan (Sutrisno, 2000).

Keadaan tersebut tidak terlepas dari penduduk di Indonesia yang masih memiliki jumlah yang besar, ini ditunjukkan data penduduknya pada tahun 2010 berjumlah 233.850.990 jiwa (Badan Pusat Statistik, 2010). Jumlah penduduk ini menuntut adanya penambahan fasilitas. Bila hal itu tidak terpenuhi akan menimbulkan masalah sosial ekonomi penduduk. Kondisi ini merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah yang bersangkutan dalam usaha untuk membangun serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya.

Sehubungan dengan perjalanan waktu, pada umumnya Provinsi dan Kabupaten/Kota mengalami jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk tersebut harus diimbangi dengan penyediaan berbagai fasilitas. Penyediaan fasilitas merupakan masalah yang serius karena jumlah fasilitas yang dibutuhkan harus sesuai dengan jumlah fasilitas yang tersedia. Apabila penyediaan fasilitas tersebut mengalami kekurangan atau berlebihan, maka pengaruh kekurangan tersebut dapat menyebabkan berbagai kekacauan, seperti saling berebut untuk mendapatkan fasilitas yang sama. Sedangkan jika berlebihan, maka fasilitas yang dibangun kurang digunakan secara optimal karena kurang sesuai dengan kebutuhan penduduknya yang sedikit. Tampaknya keadaan itu tidak sebanding dan ini tidak jarang terjadi pada fasilitas pelayanan ekonomi mencakup fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, bank, kuantitas jalan, angkutan umum, dan fasilitas pelayanan telepon (Muta'ali, 2000).

Kecamatan Tanjung Morawa adalah bahagian dari Kabupaten Deli Serdang. Penduduk di Kecamatan ini pada tahun 2010 berjumlah 192.759 jiwa (Kantor Camat Tanjung Morawa, 2012). Seluruh penduduk tersebut tentu membutuhkan berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak jarang terjadi dari berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia masih belum mencukupi sehingga menyebabkan tidak seluruh penduduknya memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan dalam meningkatkan taraf hidupnya. Hal itu diduga terjadi pada fasilitas pelayanan ekonomi seperti pada fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, bank, kuantitas jalan, angkutan umum, fasilitas pelayanan telepon dan sebagainya. Oleh karena itu perlu dikaji

ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

B. Identifikasi Masalah

Jumlah penduduk yang besar merupakan masalah yang rumit dalam suatu wilayah. Masalah ini berpengaruh terhadap penyediaan fasilitas. Penyediaan fasilitas merupakan pekerjaan yang sulit dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Jumlah penduduk yang besar tentunya akan menimbulkan masalah terhadap ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan. Masalah itu timbul disebabkan oleh penyediaan fasilitas yang kurang memadai yang semestinya dapat dipergunakan seoptimal mungkin karena fasilitas yang dibangun tidak seimbang dengan jumlah penduduk sehingga mengakibatkan rendahnya cakupan dan mutu pelayanan kepada penduduk. Tampaknya keadaan itu terjadi pada fasilitas pelayanan ekonomi meliputi fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, bank, kuantitas jalan, angkutan umum, dan fasilitas pelayanan telepon yang tidak seimbang dengan jumlah penduduk.

C. Pembatasan Masalah

Melihat luasnya cakupan tentang fasilitas pelayanan ekonomi, maka dalam penelitian ini dibatasi masalahnya agar jelas dan terarah. Adapun masalah yang dibatasi dalam fasilitas pelayanan ekonomi adalah fasilitas pelayanan pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor, dan fasilitas pelayanan bank. Fasilitas pelayanan ekonomi lainnya yakni fasilitas pelayanan kuantitas jalan, angkutan umum tidak diteliti karena indikatornya belum ada dan belum lengkap. Secara khusus untuk fasilitas pelayanan telepon tidak dapat lagi memberikan gambaran

karena penduduk sudah banyak menggunakan handphone dan internet sebagai alat komunikasi.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka didalam penelitian ini dirumuskan masalahnya dalam bentuk pertanyaan, antara lain :

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank) di Kecamatan Tanjung Morawa.
2. Bagaimana aksesibilitas dalam perkembangan ekonomi wilayah Kecamatan Tanjung Morawa.

E. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pelayanan ekonomi (fasilitas pasar, toko, kios atau warung, reparasi sepeda motor dan fasilitas bank) di Kecamatan Tanjung Morawa.
2. Untuk mengetahui aksesibilitas dalam perkembangan ekonomi wilayah Kecamatan Tanjung Morawa.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan informasi atau masukan bagi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang khususnya Pemerintah Kecamatan Tanjung Morawa dalam mengambil keputusan program pembangunan disektor fasilitas pelayanan ekonomi.
2. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis untuk menyusun karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Bahan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti lainnya dalam objek yang sama pada lokasi dan waktu yang berbeda.